

Implikasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg terhadap Penerimaan Negara dan Keuangan Daerah: Studi Kasus Jawa Barat

Riki Satia Muharam^{1*}, Budiman Rusli², Nina Karlina³, Candradewini Candradewini⁴

^{1*}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: ^{1*}r.satia.muharam@unpad.ac.id, ²budiman.rusli@unpad.ac.id,

³nina.karlina@unpad.ac.id, ⁴candradewini@unpad.ac.id

Abstract

This study analyzes the fiscal implications of the 3 kg LPG subsidy policy in Indonesia, focusing on its impact on national revenue and regional finance in West Java Province. Employing a descriptive qualitative approach supported by empirical data, the research reveals that although the subsidy aims to improve social welfare by providing affordable energy access for low-income households, it also creates significant fiscal pressure on both national and regional budgets. The findings indicate that the subsidy reduces potential state revenue, narrows fiscal space, and leads to inefficiencies due to mis-targeting and distribution leakages. At the regional level, the subsidy affects budget allocations, limits fiscal flexibility, and increases administrative burdens for monitoring and implementation. The case study in West Java illustrates how the suboptimal management of the subsidy generates a trade-off between achieving social goals and maintaining fiscal sustainability. Therefore, policy reforms are needed, including digitalized distribution systems, improved beneficiary targeting, and stronger fiscal coordination between central and local governments. This research contributes to the development of more efficient and sustainable energy subsidy policies and supports the improvement of public financial governance that is transparent and accountable at both national and subnational levels.

Keywords: Energy Subsidy, Fiscal Policy, National Revenue, Regional Finance, West Java.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi fiskal dari kebijakan subsidi LPG 3 kg di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap penerimaan negara dan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data empiris, studi ini menunjukkan bahwa meskipun subsidi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyediaan energi terjangkau, kebijakan ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap APBN dan APBD. Temuan penelitian mengungkapkan adanya pengurangan potensi penerimaan negara, penyempitan ruang fiskal, serta ketidakefisienan akibat kebocoran dan ketidaktepatan sasaran penerima. Di tingkat daerah, subsidi memengaruhi alokasi anggaran, membatasi fleksibilitas fiskal, serta meningkatkan beban administratif dalam pengawasan distribusi. Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa pengelolaan subsidi yang belum optimal menimbulkan trade-off antara tujuan sosial dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan melalui digitalisasi sistem distribusi, peningkatan akurasi data penerima manfaat, serta koordinasi fiskal yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merancang kebijakan subsidi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta mendukung penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel di tingkat nasional maupun daerah.

Kata Kunci: Subsidi Energi, Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Keuangan Daerah, Jawa Barat.

1. PENDAHULUAN

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah [1]. LPG 3 Kg sebagai bentuk subsidi energi menjadi fokus utama karena perannya yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga, menggantikan minyak tanah yang selama ini banyak digunakan [2]. Pemerintah menempatkan subsidi LPG 3 Kg sebagai alat bantu sosial untuk mengurangi beban biaya energi dan mendorong kesejahteraan masyarakat miskin, sekaligus mendukung program konversi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Penggunaan LPG subsidi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaman sosial tetapi juga sebagai alat pengendalian inflasi, karena harga energi yang stabil mampu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya [3]. Meski demikian, efektivitas subsidi ini dalam menjangkau kelompok sasaran masih menjadi tantangan, mengingat beberapa penelitian menemukan adanya kebocoran distribusi yang menyebabkan sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh rumah tangga yang kurang berhak [4]. Perbaikan mekanisme penyaluran dan monitoring subsidi menjadi hal penting untuk memaksimalkan dampak sosial dan fiskal dari kebijakan ini.

Di sisi lain, pemberian subsidi energi, termasuk LPG 3 Kg, memiliki implikasi fiskal yang besar, sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola alokasi anggaran agar tidak mengganggu keberlanjutan fiskal dan ruang belanja pembangunan lainnya [5]. Subsidi yang tepat sasaran dan efisien dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, justru dapat menimbulkan beban anggaran yang signifikan dan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal secara keseluruhan. Subsidi energi, khususnya subsidi LPG 3 Kg, merupakan beban fiskal yang signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Seiring dengan kenaikan harga energi global dan peningkatan konsumsi domestik, realisasi anggaran subsidi energi terus meningkat setiap tahunnya [1]. Beban fiskal ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah karena harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk subsidi agar harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Peningkatan anggaran subsidi sering kali mengurangi ruang fiskal untuk belanja publik lain yang juga krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dampak nyata dari besarnya beban subsidi energi terhadap APBN terlihat dari pergeseran prioritas anggaran yang mengarah pada pemangkasan atau pembatasan belanja publik non-subsidi. Studi yang dilakukan oleh INDEF (2023) mengungkap bahwa peningkatan alokasi subsidi energi menyebabkan tekanan pada belanja modal pemerintah, yang berdampak negatif pada investasi publik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini juga dapat memperlambat peningkatan kualitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pembangunan yang masih rendah. Beban fiskal subsidi energi juga menimbulkan risiko defisit anggaran yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas harga energi untuk masyarakat dan memastikan keberlanjutan fiskal negara. Reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan efisien menjadi sangat penting agar tidak mengorbankan alokasi belanja publik yang mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan [4]. Penyesuaian kebijakan subsidi harus dilakukan dengan hati-hati dan berbasis data yang akurat agar tujuan sosial dan ekonomi dapat tercapai secara berimbang.

Fenomena kebocoran subsidi LPG 3 Kg merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan kebijakan subsidi energi di Indonesia. Kebocoran ini terjadi ketika subsidi tidak tepat sasaran, yakni lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk dalam golongan penerima manfaat yang berhak, seperti rumah tangga kelas menengah ke atas [2]. Kondisi ini menyebabkan alokasi subsidi tidak optimal dan berkurangnya dampak sosial yang diharapkan, sehingga tujuan utama subsidi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif. Ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 Kg juga berdampak langsung pada efisiensi fiskal pemerintah. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kelompok miskin justru terbuang percuma pada konsumsi rumah tangga yang tidak membutuhkan bantuan tersebut [4]. Akibatnya, beban anggaran subsidi meningkat tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebocoran subsidi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara yang pada akhirnya dapat mengganggu keberlanjutan fiskal dan kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan lainnya.

Kebocoran subsidi LPG juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara yang memerlukan reformasi sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat. Implementasi teknologi seperti sistem registrasi elektronik dan verifikasi data penerima subsidi menjadi langkah strategis untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan ketepatan sasaran [1]. Dengan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi fiskal dan memastikan bahwa bantuan energi tepat sasaran serta memberikan dampak sosial yang maksimal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam distribusi subsidi energi, termasuk subsidi LPG 3 Kg, khususnya dalam mengawasi dan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran di wilayahnya. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan sosial yang terkait dengan subsidi energi agar dapat menjangkau masyarakat miskin secara efektif [6]. Peran ini sangat krusial mengingat pemerintah pusat mengalokasikan anggaran subsidi, namun pelaksanaan di lapangan memerlukan koordinasi dan pengawasan dari pemerintah daerah agar subsidi tidak terjadi kebocoran dan tepat guna.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam distribusi subsidi juga memberikan tekanan terhadap keuangan daerah. Beberapa daerah harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mendukung mekanisme penyaluran subsidi, seperti biaya administrasi, pengawasan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi [7]. Kondisi ini dapat berdampak pada penyesuaian anggaran daerah yang berpotensi mengurangi alokasi untuk program pembangunan lain yang juga penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Distribusi subsidi LPG yang tidak efisien bisa membebani APBD dan menghambat pengembangan layanan publik di tingkat daerah. Lebih jauh, peran pemerintah daerah dalam mengelola subsidi energi juga menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan dukungan data dan teknologi informasi yang memadai, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi identifikasi penerima manfaat serta memperbaiki proses distribusi subsidi [1]. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kebocoran subsidi, tetapi juga membantu menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Studi regional, khususnya di Jawa Barat, menjadi sangat penting dalam memahami dampak kebijakan subsidi LPG 3 Kg terhadap keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi terbesar dan tingkat konsumsi LPG yang tinggi, merepresentasikan tantangan fiskal yang signifikan bagi kedua tingkat pemerintahan [8]. Kondisi ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik terkait bagaimana subsidi yang dialokasikan dari APBN memengaruhi keuangan daerah serta bagaimana pemerintah daerah menyesuaikan anggaran untuk mendukung distribusi subsidi tersebut. Pendekatan studi regional juga membantu mengidentifikasi perbedaan karakteristik sosial-ekonomi dan pola konsumsi energi antar daerah yang memengaruhi efektivitas subsidi. Studi oleh Muharam, Rusli, Karlina, dan Candradewini (2025) menunjukkan bahwa kondisi demografis dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat memerlukan pendekatan distribusi subsidi yang berbeda dibandingkan daerah lain. Pemahaman mendalam terhadap konteks regional ini penting untuk mengoptimalkan kebijakan subsidi agar tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Studi regional di Jawa Barat berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terfokus dan berbasis bukti empiris terkait pengelolaan subsidi energi. Dengan data dan analisis yang akurat dari tingkat regional, pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Hal ini sangat penting agar subsidi energi tidak hanya menjadi beban fiskal yang besar, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang efektif dan berkelanjutan [1].

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur terkait kebijakan fiskal dan subsidi energi, khususnya pada tingkat daerah. Dengan fokus pada distribusi dan dampak subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat, penelitian ini menghadirkan data dan analisis yang dapat memperkaya pemahaman akademis serta praktis mengenai bagaimana kebijakan subsidi memengaruhi keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga dalam kajian fiskal dan subsidi energi di Indonesia maupun konteks serupa di wilayah lain.

Selain itu, penelitian ini mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam aspek pengalokasian dan penyaluran subsidi energi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi subsidi

LPG 3 Kg, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi potensi kebocoran dan ketidaktepatan sasaran subsidi yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan serta akuntabel. Lebih jauh, relevansi penelitian ini sangat penting bagi berbagai pihak, terutama pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan subsidi. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi auditor keuangan negara dalam melakukan pengawasan anggaran subsidi, serta lembaga riset ekonomi dan fiskal yang membutuhkan data dan analisis empiris untuk mendukung kajian strategis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam pengelolaan keuangan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yang menjadi titik perhatian dalam analisis kebijakan subsidi LPG 3 Kg. Pertama, bagaimana pengaruh kebijakan subsidi LPG 3 Kg terhadap penerimaan negara secara makro. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana subsidi tersebut berdampak pada pendapatan negara dan keberlanjutan fiskal di tingkat nasional. Kedua, penelitian ini mengkaji dampak fiskal dari subsidi LPG terhadap struktur dan fleksibilitas keuangan daerah, khususnya di provinsi Jawa Barat. Aspek ini menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan subsidi dan pengaruhnya terhadap kemampuan fiskal daerah dalam mengelola anggaran serta memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Ketiga, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana kebijakan subsidi LPG 3 Kg menimbulkan trade-off antara upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan kinerja fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, rumusan masalah ini akan membantu mengarahkan analisis terhadap efektivitas subsidi LPG dalam memenuhi tujuan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh kebijakan subsidi LPG 3 Kg terhadap penerimaan negara secara makro; (2) mengevaluasi dampak fiskal subsidi LPG terhadap struktur dan fleksibilitas keuangan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat; dan (3) mengidentifikasi trade-off antara peningkatan kesejahteraan sosial dan kinerja fiskal akibat pelaksanaan subsidi energi ini. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan fiskal yang lebih efisien dan berkeadilan.

Celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh studi ini terletak pada kurangnya kajian empiris yang mengaitkan secara langsung antara beban fiskal akibat subsidi LPG 3 Kg dengan dinamika keuangan daerah, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada efektivitas distribusi atau dampak ekonomi secara umum, tanpa melihat secara terintegrasi dampak fiskal pada dua level pemerintahan. Studi ini melengkapi literatur dengan pendekatan yang menggabungkan analisis kebijakan fiskal nasional dan implikasinya terhadap pengelolaan APBD di tingkat provinsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implikasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg terhadap penerimaan negara dan keuangan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena kebijakan secara komprehensif dan kontekstual, dengan menitikberatkan pada narasi, dinamika sosial, serta makna di balik data dan kebijakan yang dianalisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, kajian literatur, serta wawancara mendalam dengan informan kunci. Studi dokumen mencakup telaah terhadap laporan-laporan resmi dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen APBN dan APBD yang relevan dengan kebijakan subsidi energi. Kajian literatur melibatkan studi terdahulu yang membahas subsidi energi dan fiskal daerah. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi kebijakan publik yang memiliki pemahaman langsung terhadap pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat. Selain itu, data sekunder berupa angka statistik dan laporan keuangan digunakan untuk mendukung analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yang mencakup identifikasi isu-isu utama seperti beban fiskal, kebocoran subsidi, dan fleksibilitas anggaran daerah, lalu dikategorikan dan dianalisis untuk menemukan pola serta hubungan antar-tema. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, validasi silang antar-literatur dan hasil wawancara, serta penalaran logis untuk memastikan bahwa temuan dan

interpretasi yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Subsidi LPG 3 Kg terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Fiskal Makro

3.1.1 Subsidi LPG 3 Kg dan Beban Fiskal Negara

Subsidi LPG 3 Kg merupakan salah satu komponen utama dalam anggaran subsidi energi di Indonesia yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menetapkan alokasi anggaran subsidi ini untuk meringankan beban biaya energi bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan menjaga stabilitas harga LPG 3 Kg agar tetap terjangkau. Besaran alokasi subsidi ini tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya permintaan dan harga energi global [9]. Tren realisasi subsidi LPG 3 Kg dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan kenaikan yang signifikan. Data Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa realisasi anggaran subsidi LPG meningkat seiring fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan penyesuaian harga yang diterapkan pemerintah. Misalnya, pada periode 2020-2023, realisasi subsidi LPG 3 Kg mengalami peningkatan rata-rata tahunan sekitar 8%, yang sebagian besar disebabkan oleh lonjakan konsumsi domestik serta kenaikan harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi biaya produksi LPG [10].

Beberapa faktor utama memengaruhi besaran subsidi LPG 3 Kg, antara lain harga minyak dunia, konsumsi LPG domestik, dan kebijakan pemerintah terkait harga eceran LPG. Harga minyak dunia yang volatil berdampak langsung pada biaya impor dan produksi LPG, sehingga ketika harga minyak naik, beban subsidi juga meningkat untuk menjaga harga jual LPG tetap stabil. Konsumsi LPG yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas rumah tangga turut menambah tekanan fiskal pada anggaran subsidi. Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual LPG 3 Kg di bawah harga pasar juga menjadi faktor kunci yang menyebabkan besarnya beban subsidi ini [11]. Beban fiskal subsidi LPG 3 Kg menjadi tantangan penting bagi pengelolaan APBN, yang memerlukan pengawasan ketat dan reformasi kebijakan agar subsidi lebih tepat sasaran dan efisien, sehingga mampu mendukung tujuan sosial tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.

3.1.2 Dampak Subsidi LPG terhadap Penerimaan Negara

Subsidi LPG 3 Kg memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara, baik dari sisi penerimaan pajak maupun non-pajak. Dengan adanya subsidi yang menjaga harga LPG tetap rendah, konsumsi LPG menjadi tinggi, tetapi di sisi lain pemerintah harus menanggung biaya subsidi yang cukup besar dari APBN. Subsidi ini secara langsung mengurangi potensi penerimaan pajak dari sektor energi karena harga yang distabilkan tersebut menekan nilai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang seharusnya dapat diterima jika harga LPG mengikuti mekanisme pasar [1]. Konsep *opportunity cost* sangat relevan dalam konteks subsidi LPG ini. Subsidi yang diberikan pada LPG 3 Kg menyebabkan pemerintah kehilangan potensi penerimaan yang bisa digunakan untuk sektor lain yang lebih produktif. Misalnya, dana yang dialokasikan untuk subsidi energi sebetulnya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, subsidi juga dapat mengakibatkan distorsi pasar dan menurunkan insentif efisiensi penggunaan energi [11].

Dari sisi fiskal makro, beban subsidi LPG turut memberikan tekanan terhadap defisit anggaran dan peningkatan utang negara. Ketika subsidi meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara, pemerintah harus menutupi kekurangan tersebut dengan menerbitkan utang baru. Kondisi ini berdampak pada rasio utang terhadap PDB yang meningkat, serta membatasi ruang fiskal pemerintah untuk pengeluaran produktif lainnya. Penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi agar beban fiskal dapat dikendalikan tanpa mengurangi tujuan sosial subsidi tersebut [12].

3.1.3 Efisiensi dan Efektivitas Kebijakan Subsidi dalam Konteks Makroekonomi

Evaluasi terhadap ketepatan sasaran subsidi LPG 3 Kg merupakan aspek krusial dalam menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan subsidi ini dalam konteks makroekonomi. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa meskipun subsidi ini ditujukan untuk membantu rumah tangga berpendapatan rendah, kenyataannya sebagian besar konsumsi subsidi justru dinikmati oleh

kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Ketidaktepatan sasaran ini menyebabkan pemborosan anggaran dan berdampak pada beban fiskal yang tidak proporsional, sehingga mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk pengeluaran pembangunan lainnya [1] [4]. Dari sisi makroekonomi, subsidi LPG 3 Kg juga memiliki pengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan adanya subsidi yang menjaga harga LPG relatif stabil dan rendah, subsidi ini berperan sebagai penahan inflasi, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat, yang berkontribusi pada stabilitas konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi [11]. Apabila subsidi tidak dikelola secara efisien, potensi distorsi pasar dapat muncul, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas kebijakan fiskal secara keseluruhan.

Perbandingan dengan kebijakan subsidi energi di negara lain juga memberikan gambaran penting mengenai efektivitas subsidi LPG di Indonesia. Beberapa negara berkembang menerapkan subsidi energi dengan pendekatan yang lebih tertarget, menggunakan teknologi digital untuk memastikan bantuan tepat sasaran, serta melakukan reformasi bertahap guna mengurangi beban fiskal. Contohnya, Malaysia dan Thailand telah mengadopsi mekanisme pengaturan harga dan penyaluran subsidi yang lebih transparan dan berbasis data, sehingga efisiensi penggunaan anggaran subsidi meningkat tanpa mengorbankan tujuan sosial [13]. Pembelajaran dari negara-negara tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam reformasi kebijakan subsidi LPG di Indonesia agar lebih efektif dan berkelanjutan.

3.1.4 Strategi Pengelolaan Subsidi untuk Mendukung Penerimaan Negara

Reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg menjadi langkah krusial dalam mengurangi beban fiskal sekaligus mendukung penerimaan negara yang lebih sehat. Salah satu strategi utama adalah penyesuaian harga LPG secara bertahap agar lebih mencerminkan harga pasar, sehingga subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi distorsi ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi strategis dalam pengawasan distribusi subsidi menjadi penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan transparansi anggaran subsidi [10]. Diversifikasi sumber energi juga menjadi bagian penting dalam strategi fiskal untuk mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi. Pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan dan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti biogas, listrik tenaga surya, dan energi baru lainnya. Dengan adanya diversifikasi ini, beban subsidi LPG dapat berkurang seiring menurunnya konsumsi LPG secara bertahap. Strategi ini tidak hanya mengurangi tekanan fiskal, tetapi juga berkontribusi pada tujuan keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim [13].

Berbagai rekomendasi kebijakan diusulkan untuk mengurangi beban subsidi dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Di antaranya adalah penerapan mekanisme subsidi yang lebih terarah dan berbasis data, peningkatan kapasitas pengawasan melalui teknologi informasi, serta integrasi kebijakan subsidi dengan program-program sosial lain seperti bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, peningkatan penerimaan negara dapat diperoleh melalui reformasi perpajakan sektor energi dan optimalisasi sumber pendapatan lain yang tidak membebani anggaran subsidi secara langsung. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan keberlanjutan fiskal [9].

3.2 Dampak Subsidi LPG 3 Kg terhadap Struktur dan Fleksibilitas Keuangan Daerah di Jawa Barat

3.2.1 Dampak Subsidi LPG terhadap Struktur Keuangan Daerah

Subsidi LPG 3 Kg memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur keuangan daerah, terutama dalam hal komposisi pendapatan dan belanja daerah. Meskipun subsidi ini merupakan program pusat, dampaknya terasa di tingkat daerah, terutama pada pola alokasi anggaran dan prioritas pengeluaran daerah. Subsidi yang besar pada energi ini dapat menyebabkan alokasi dana daerah cenderung terserap untuk mendukung distribusi dan pengawasan subsidi, sehingga mempengaruhi komposisi belanja daerah yang mungkin mengalihkan perhatian dari belanja produktif dan pembangunan [14]. Subsidi LPG juga memengaruhi perubahan proporsi transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah pusat kerap menyesuaikan transfer dana ke daerah untuk mengkompensasi beban subsidi atau memperhitungkan pengeluaran daerah yang terkait dengan pelaksanaan subsidi. Hal ini berdampak pada struktur pendapatan daerah yang menjadi kurang fleksibel karena sebagian dana sudah "terikat" untuk tujuan subsidi, sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk pengelolaan anggaran lainnya [15].

Meskipun subsidi LPG 3 Kg adalah program pusat, beberapa daerah, termasuk di Jawa Barat, menghadapi beban belanja subsidi daerah yang tidak langsung, seperti biaya distribusi, pengawasan, dan administrasi. Beban ini dapat mengurangi kapasitas keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan lainnya. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih luas [16]. Pemahaman mendalam tentang dampak subsidi LPG terhadap struktur keuangan daerah menjadi penting untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih berimbang antara pusat dan daerah.

3.2.2 Dampak Subsidi LPG terhadap Fleksibilitas Fiskal Daerah

Subsidi LPG 3 Kg, meskipun dikelola oleh pemerintah pusat, berdampak langsung terhadap fleksibilitas fiskal pemerintah daerah, termasuk di Jawa Barat. Subsidi yang bersifat insentif sosial ini sering kali menyita sebagian besar sumber daya fiskal yang seharusnya dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya subsidi yang cukup besar, kemampuan daerah untuk mengatur pengeluaran yang lebih produktif seperti investasi infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik menjadi terbatas [17]. Ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja pembangunan dan program-program strategis mengalami tekanan akibat alokasi dana yang harus digunakan untuk mendukung implementasi subsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat yang lain, sehingga fleksibilitas keuangan daerah menjadi semakin sempit. Subsidi LPG yang tidak dikelola secara efisien dapat menjadi beban bagi fiskal daerah, menghambat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal [15].

Subsidi LPG juga dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Subsidi yang efektif dapat membantu menstabilkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan pajak daerah. Peran subsidi dalam memperluas atau membatasi fleksibilitas keuangan daerah sangat tergantung pada kebijakan pengelolaan subsidi itu sendiri dan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah [18].

3.2.3 Tantangan dan Kendala dalam Pengelolaan Subsidi LPG di Tingkat Daerah

Pengelolaan subsidi LPG 3 Kg di tingkat daerah, khususnya di Jawa Barat, menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis yang cukup kompleks. Distribusi subsidi yang melibatkan banyak pihak rentan terhadap inefisiensi dan ketidaktepatan, terutama dalam hal pendataan penerima manfaat yang valid dan pengendalian distribusi di lapangan. Hal ini menyebabkan proses distribusi seringkali mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama subsidi [19]. Potensi kebocoran subsidi menjadi masalah serius yang menghambat efektivitas program ini. Kebocoran dapat berupa distribusi kepada rumah tangga non-miskin, penyelewengan dalam rantai distribusi, hingga penyalahgunaan subsidi untuk tujuan komersial. Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya merugikan pemerintah dalam hal pemborosan anggaran, tetapi juga mengurangi dampak positif subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat miskin [20].

Kendala lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas pengawasan dan pengelolaan fiskal di tingkat daerah. Pemerintah daerah sering kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melakukan monitoring dan evaluasi subsidi secara efektif. Hal ini memperlemah kontrol terhadap pelaksanaan subsidi dan memperbesar risiko inefisiensi fiskal. Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem informasi yang lebih baik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan tata kelola subsidi LPG di tingkat daerah [21].

3.2.4 Studi Kasus dan Data Empiris di Jawa Barat

Data realisasi subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Subsidi ini memberikan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam hal pengelolaan belanja subsidi yang terkait dengan distribusi dan pengawasan. Pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran mereka agar dapat mendukung kelancaran program subsidi ini, yang berimplikasi pada pergeseran prioritas belanja daerah [12]. Analisis kuantitatif menggunakan indikator fiskal daerah seperti rasio belanja terhadap pendapatan, rasio defisit, dan rasio ketergantungan pada transfer pusat memperlihatkan bahwa besarnya subsidi LPG memiliki korelasi dengan pembatasan fleksibilitas fiskal daerah. Studi regresi menunjukkan bahwa daerah dengan konsumsi LPG tinggi cenderung memiliki rasio defisit yang lebih besar dan ruang fiskal yang lebih terbatas, yang dapat

berdampak pada kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan public [18].

Perbandingan kondisi fiskal antar kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan variasi signifikan dalam pengelolaan subsidi LPG. Kabupaten dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat mampu mengelola subsidi dengan lebih efisien dan tetap menjaga ruang fiskal yang memadai, sementara daerah dengan keterbatasan sumber daya lebih rentan mengalami tekanan fiskal. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dalam kebijakan subsidi LPG untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah [16].

3.2.5 Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Pengelolaan subsidi LPG 3 Kg di tingkat daerah memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas subsidi tersebut. Salah satu strategi yang penting adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan dan distribusi subsidi, sehingga dapat meminimalisasi kebocoran dan memastikan subsidi tepat sasaran. Digitalisasi sistem distribusi juga dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring *real-time* terhadap pelaksanaan subsidi, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan publik dapat meningkat [21]. Peningkatan koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal yang berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu memperkuat mekanisme transfer dana yang responsif terhadap kebutuhan daerah, sementara pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas pengelolaan fiskal dan pengawasan subsidi. Sinergi antara kedua pihak ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi dan mengurangi beban fiskal yang tidak proporsional pada daerah [12].

Rekomendasi kebijakan lainnya adalah merancang subsidi sosial yang lebih terintegrasi dan berbasis data, dengan memperhatikan keseimbangan antara dukungan sosial dan kinerja fiskal. Pengembangan alternatif sumber energi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan juga perlu diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi LPG. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fiskal sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara efektif [18].

3.3 Trade-off antara Tujuan Sosial dan Keseimbangan Fiskal dalam Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Indonesia dirancang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada bahan bakar ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya subsidi ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin dapat mengakses energi yang terjangkau dan aman, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa subsidi ini secara langsung membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, mendorong pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi risiko kemiskinan energi [18]. Dari sisi fiskal, subsidi LPG 3 Kg menimbulkan beban yang cukup besar terhadap anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Besarnya alokasi subsidi ini menimbulkan tekanan pada kemampuan fiskal pemerintah untuk mendanai program-program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, terdapat *trade-off* antara alokasi dana untuk subsidi yang secara sosial penting, dengan kebutuhan untuk menjaga kinerja fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Subsidi yang besar dan terus meningkat dapat memperlemah fleksibilitas anggaran dan mendorong risiko defisit serta utang pemerintah yang lebih tinggi [12].

Ketepatan sasaran subsidi juga menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas kebijakan ini. Banyak studi mengungkapkan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi LPG menyebabkan sebagian besar subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin. Kondisi ini tidak hanya mengurangi manfaat sosial dari subsidi, tetapi juga memperbesar beban fiskal tanpa hasil yang proporsional. Ketidaktepatan sasaran ini juga menimbulkan persoalan efisiensi fiskal, di mana anggaran yang tersedia tidak digunakan secara optimal untuk membantu kelompok yang paling membutuhkan [21].

Trade-off ini menjadi semakin kompleks ketika harus mempertimbangkan dampak makroekonomi subsidi LPG terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Subsidi yang mendorong harga energi tetap rendah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat kelas bawah, namun juga dapat menyebabkan distorsi harga dan mengurangi insentif untuk efisiensi energi. Pemerintah harus menyeimbangkan antara memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka panjang [18].

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg perlu dirancang ulang dengan pendekatan yang lebih terfokus dan efisien, misalnya dengan menggunakan teknologi digital untuk verifikasi penerima subsidi dan diversifikasi energi. Pemerintah juga harus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan subsidi tidak hanya tepat sasaran tetapi juga tidak mengganggu keseimbangan fiskal. Dengan demikian, trade-off antara peningkatan kesejahteraan sosial dan kinerja fiskal yang sehat dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg memberikan dampak ganda bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini berperan sebagai instrumen sosial untuk melindungi daya beli masyarakat miskin melalui penyediaan energi yang terjangkau. Di sisi lain, subsidi ini menciptakan tekanan serius terhadap penerimaan negara dan struktur fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal akibat peningkatan belanja subsidi yang signifikan, sedangkan pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam fleksibilitas anggaran karena harus turut mendukung distribusi dan pengawasan subsidi. Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran dan kebocoran distribusi masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg. Hal ini tidak hanya menurunkan efektivitas kebijakan, tetapi juga menyebabkan *inefisiensi* fiskal yang berdampak pada pemborosan anggaran. Besarnya beban subsidi memunculkan *trade-off* yang nyata antara peningkatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan fiskal, dibutuhkan reformasi kebijakan subsidi yang lebih terarah dan efisien. Langkah-langkah seperti digitalisasi sistem distribusi, pemutakhiran data penerima manfaat, serta koordinasi fiskal yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan subsidi tepat sasaran tanpa membebani APBN dan APBD secara berlebihan. Dengan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data, subsidi LPG 3 Kg dapat terus berperan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENCES

- [1] Badan Kebijakan Fiskal, "Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020.
- [2] BRIN, "Subsidi Elpiji untuk Siapa?," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 2023.
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Kebijakan Fiskal," 2021.
- [4] Muharam, R.S, Rusli, B., Karlina, N. and Candradewini, C., "Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat: Distribusi Kesejahteraan, Risiko Ekologis, dan Ekonomi Publik," *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, pp. 130-141, 2025.
- [5] INDEF, "Kapasitas Fiskal dalam Menghadapi Dinamika Subsidi dan Kompensasi Energi.," Institute for Development of Economics and Finance, 2023.
- [6] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan Bantuan Sosial," 2022.
- [7] INDEF, "Kapasitas Fiskal dalam Menghadapi Dinamika Subsidi dan Kompensasi Energi," Institute for Development of Economic and Finance, 2023.
- [8] Badan Pusat Statistik Jawa Barat, "Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023," 2023.
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Realisasi Anggaran Subsidi Energi 2020-2023," Direktorat Jenderal Anggaran, 2023.
- [10] Badan Kebijakan Fiskal, "Reformasi kebijakan subsidi energi: Penyesuaian dan pengawasan digital," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
- [11] Susanto, A., and Pratiwi, L., "Optimalisasi pengelolaan subsidi LPG dan dampaknya terhadap fiskal Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, pp. 150-167, 2024.

- [12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Subsidi Energi," Direktorat Jenderal Anggaran, 2023.
- [13] International Energy Agency, "Energy transitions and subsidy reform in Southeast Asia," IEA Publications, 2023.
- [14] Siregar, R., and Fadilah, N., "Pengaruh subsidi LPG 3 Kg terhadap alokasi anggaran daerah di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, pp. 110-126, 2023.
- [15] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Kebijakan Fiskal dan Transfer Dana ke Daerah Tahun 2022," Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022.
- [16] Pratama, H., and Widjaja, A., "Beban fiskal subsidi energi dan implikasinya terhadap keuangan daerah: Studi kasus Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, pp. 45-61, 2024.
- [17] Wahyuni, R., and Santoso, B. "Pengaruh subsidi energi terhadap alokasi anggaran pembangunan daerah di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Fiskal*, pp. 134-150, 2023.
- [18] Sari, D. P., and Putra, M. A., "Efek subsidi LPG terhadap fleksibilitas fiskal pemerintah daerah: Studi di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, pp. 75-92, 2024.
- [19] Rahmawati, N., and Nugroho, A., "Kendala teknis distribusi subsidi LPG dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, pp. 78-94, 2023.
- [20] Kusuma, T., and Hartono, B., "Evaluasi efektivitas subsidi LPG 3 Kg dan tantangan distribusinya di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, pp. 205-220, 2022.
- [21] Putri, S. A., and Yulianto, D., "Penguatan kapasitas pengawasan fiskal daerah dalam pengelolaan subsidi energi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, pp. 89-105, 2024.